



KEMENPKP
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) TRIWULAN II



**20
26**

**BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN JAWA II**
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II periode April–Juni 2026 dapat disusun tepat waktu. Laporan ini menjadi bentuk evaluasi kinerja pelayanan publik dan komitmen peningkatan kualitas layanan, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman secara konsisten berupaya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala sebagai sarana untuk memperoleh umpan balik langsung dari pengguna layanan.

Melalui pelaksanaan SKM ini, diharapkan diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai tingkat kepuasan masyarakat, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Bandung, 02 Juli 2026

**Kepala Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman**



Mochammad Mulya Permana, S.T., M.T.

NIP. 19710920 199803 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Manfaat	1
1.3 Metode Pengumpulan Data.....	1
1.4 Waktu Pelaksanaan SKM.....	3
1.5 Penentuan Jumlah Responden.....	3
BAB II.....	4
ANALISIS DATA SKM.....	4
2.1 Analisis Responden.....	4
2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan	5
2.3 Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut.....	6
BAB III.....	8
HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA	8
BAB IV	10
KESIMPULAN.....	10
LAMPIRAN	12
1. Kuesioner.....	12
2. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM (Foto-Foto Pelaksanaan SKM).....	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menegaskan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam menilai kinerja pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara layanan.

Sebagai bentuk implementasi dari kebijakan tersebut, pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 memberikan pedoman bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan SKM. Survei ini menjadi instrumen penting untuk mengukur persepsi masyarakat sekaligus mengevaluasi kualitas pelayanan secara objektif.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Pelaksanaan SKM bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan serta menilai kinerja unit pelayanan secara menyeluruh. Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan SKM antara lain:

1. Mengetahui persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan;
2. Mengidentifikasi aspek pelayanan yang masih perlu ditingkatkan;
3. Menjadi bahan evaluasi kinerja pelayanan secara periodik;
4. Mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan;
5. Menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan perbaikan pelayanan; dan
6. Memberikan informasi kepada masyarakat terkait kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan.

1.3 Metode Pengumpulan Data

Survei Kepuasan Masyarakat pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II dilaksanakan dengan menggunakan metode penyebaran kuesioner elektronik kepada pengguna layanan.

Penggunaan kuesioner elektronik dimaksudkan untuk mempermudah proses

pengumpulan data, meningkatkan jangkauan responden, serta mempercepat proses pengolahan hasil survei. Responden dapat mengisi kuesioner secara mandiri melalui media digital yang telah disediakan.

Instrumen kuesioner disusun berdasarkan 9 (sembilan) unsur pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017, yang meliputi :

1. **Persyaratan:** Persyaratan adalah ketentuan teknis maupun administratif yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis layanan dan dipublikasikan melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur:** Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan, serta pemantauan terhadap potensi kecurangan dalam pelaksanaannya.
3. **Waktu penyelesaian:** Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif:** Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Unsur ini juga mencakup pengawasan terhadap praktik percaloan serta potensi pungutan liar dalam pelaksanaan pelayanan.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan:** Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana:** Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana:** Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan:** Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. **Sarana dan prasarana:** Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan pada penyelenggaraan pelayanan, baik secara luring, daring maupun hybrid.

Setiap unsur dinilai oleh responden berdasarkan pengalaman mereka dalam menerima layanan, sehingga hasil yang diperoleh dapat mencerminkan kondisi pelayanan secara aktual.

1.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara berkala dalam periode triwulanan atau setiap 3 (tiga) bulan. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa evaluasi terhadap kualitas pelayanan dapat dilakukan secara lebih cepat dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.

Pada periode laporan ini, pelaksanaan SKM dilakukan pada bulan April–Juni 2026, yang mencakup seluruh proses mulai dari penyebaran kuesioner, pengumpulan data, hingga pengolahan hasil survei..

1.5 Penentuan Jumlah Responden

Penentuan jumlah responden dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah pengguna layanan pada periode survei serta mengacu pada pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017.

Jumlah responden yang dilibatkan dalam survei ini sebanyak orang, yang merupakan representasi dari total pengguna layanan sebanyak **412** orang pada periode April - Juni 2026.

Jumlah tersebut dinilai telah memadai untuk menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat secara umum terhadap pelayanan yang diberikan oleh unit kerja..

BAB II

ANALISIS DATA SKM

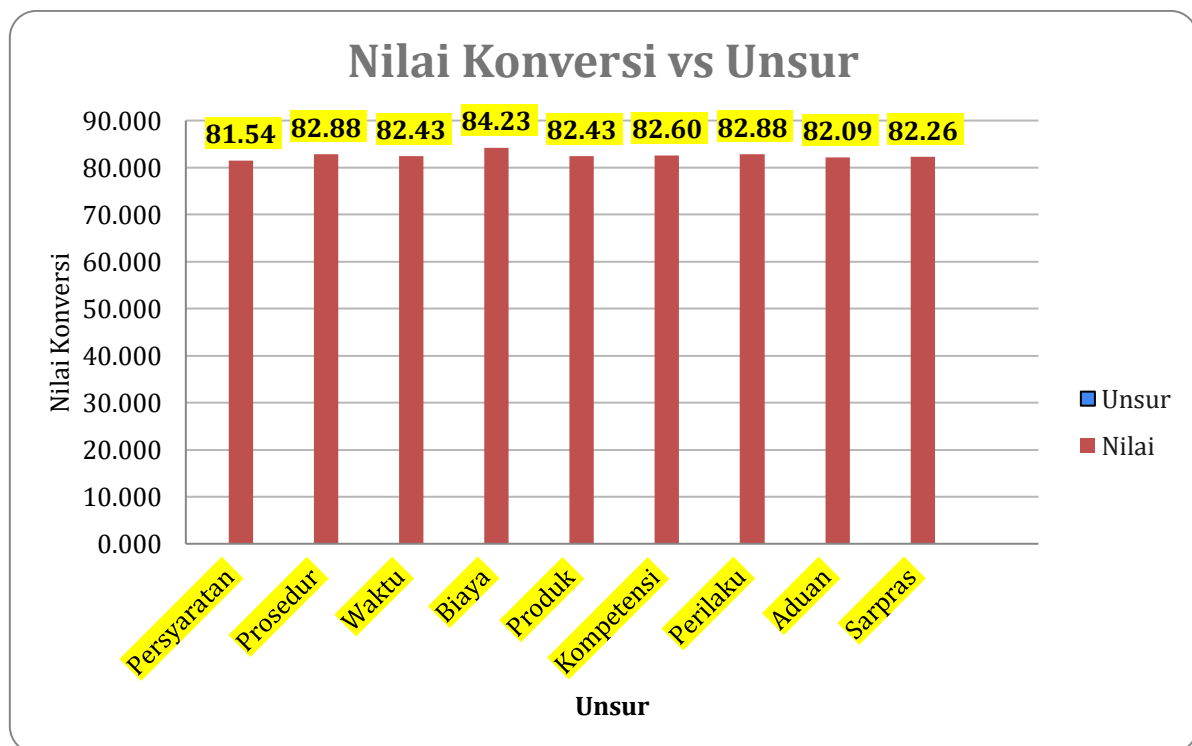
2.1 Analisis Responden

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 75 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	Jenis Kelamin	Laki-Laki	36	48.0%
		Perempuan	39	52.0%
2	Pendidikan	Tidak Sekolah	0	0.0%
		SD/Sederajat	26	34.7%
		SMP/Sederajat	17	22.7%
		SMA/Sederajat	13	17.3%
		D1/D2/D3	2	2.7%
		D4/S1	16	21.3%
		S2	1	1.3%
		S3	0	0.0%
3	Pekerjaan	ASN	7	9.3%
		TNI	0	0.0%
		POLRI	0	0.0%
		Swasta	8	10.7%
		Wirausaha	4	5.3%
		Ibu Rumah Tangga	21	28.0%
		Pelajar/Mahasiswa	0	0.0%
		Petani/Nelayan	0	0.0%
		Pekerja Lepas/Freelance	13	17.3%
		Pensiunan	0	0.0%
		Lainnya	22	29.3%
4	Kategorisasi Pengguna Layanan	Non Disabilitas	62	82.7%
		Disabilitas	13	17.3%
5	Kategorisasi Jenis Disabilitas	Disabilitas Fisik	2	50.0%
		Disabilitas Intelektual	0	0.0%
		Disabilitas Mental	1	25.0%
		Disabilitas Sensorik	1	25.0%

2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan

N o.	Jenis Layanan	Jumlah Respon- den	Persyar- atan	Prose- dur	Wa- ktu	Bia- ya	Prod- uk	Kompet- ensi	Peril- aku	Adu- an	Saran a Prasar- ana	IKM Per Jenis Laya- nan
1.	Layanan Klinik PKP (KonsultasiPerumahan, RP3KP & RP2KPKP)	49	81,38	82,48	80,61	82,82	81,63	82,14	82,31	81,63	81,63	81,85
2.	Layanan Pengaduan (Benar-PKP, SP4NLAPOR!)	5	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	90,00	85,00	85,56
3.	Layanan Informasi Publik (PPID)	21	81,07	83,33	86,25	87,50	83,75	83,13	83,75	81,25	83,13	83,68
Rerata IKM Per Unsur			81,54	82,88	82,43	84,23	82,43	82,6	82,88	82,09	82,26	82,6
IKM Unit Layanan			82,60									
Mutu Unit Layanan			B									



Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur

2.3 Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut

Dari hasil analisis data SKM, kami mengidentifikasi bahwa **aspek persyaratan layanan dan penanganan pengaduan, saran dan masukan** merupakan dua unsur yang masih memiliki nilai relatif lebih rendah dibandingkan unsur pelayanan lainnya. Secara kuantitatif, kedua dimensi ini masih memiliki ruang untuk terus ditingkatkan. Unsur persyaratan memperoleh nilai terendah yaitu **81,54**. Selanjutnya unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan memperoleh nilai **82,09** sebagai nilai terendah kedua.

Sementara itu, unsur **biaya/tarif** memperoleh nilai tertinggi yaitu **84,23**, yang menunjukkan bahwa masyarakat menilai biaya layanan sudah transparan, terjangkau, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (gratis). Adapun unsur lainnya seperti prosedur, waktu penyelesaian, produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, serta sarana dan prasarana berada pada kategori baik dengan nilai di atas **82**, yang mencerminkan kinerja pelayanan yang relatif stabil namun tetap perlu ditingkatkan secara berkelanjutan.

Secara kualitatif, berdasarkan kritik dan saran yang disampaikan oleh responden, masih terdapat masukan bahwa persyaratan layanan perlu disampaikan secara lebih sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, mekanisme penyampaian pengaduan, saran, dan masukan diharapkan semakin mudah diakses serta direspons secara lebih cepat sehingga masyarakat memperoleh kepastian terhadap tindak lanjut yang diberikan.

Atas dasar temuan tersebut, unit kerja kami menyusun rencana tindak lanjut yang tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan nilai SKM secara kuantitatif, tetapi juga untuk menjawab permasalahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Fokus utama perbaikan diarahkan pada penyederhanaan informasi persyaratan layanan serta optimalisasi mekanisme penanganan pengaduan melalui peningkatan kemudahan akses dan kecepatan tindak lanjut. Selain itu, peningkatan kualitas pada unsur lainnya tetap menjadi perhatian guna menjaga konsistensi dan meningkatkan mutu pelayanan secara menyeluruh. Berdasarkan hasil analisis tersebut, berikut rencana tindak lanjut yang telah kami susun untuk perbaikan layanan ke depan.

No.	Unsur	Rencana Tindak Lanjut	Waktu	Penanggung Jawab
1	Persyaratan	Menyelenggarakan forum konsultasi publik untuk mereviu standar pelayanan	Juli 2026	Bidang Pelayanan
		Melakukan penyederhanaan informasi persyaratan layanan melalui media informasi yang mudah dipahami masyarakat	Agustus 2025	Bidang Pelayanan
2	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Melakukan evaluasi mekanisme penanganan pengaduan serta penyempurnaan alur tindak lanjut	September 2026	Bidang Pelayanan
		Meningkatkan sosialisasi kanal pengaduan dan melakukan monitoring terhadap kecepatan respons penyelesaian pengaduan	September 2026	Bidang Pelayanan

BAB III

HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan II Tahun 2026 merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi SKM Triwulan I Tahun 2026 yang telah dilaksanakan sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi pada periode sebelumnya, unsur **persyaratan** dan **waktu penyelesaian** menjadi prioritas utama dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan karena memperoleh nilai terendah dibandingkan unsur pelayanan lainnya. Oleh karena itu, berbagai langkah perbaikan telah dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap hasil survei tersebut.

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman periode **Januari-April 2026** menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode Januari-April 2026

No	Unsur	IKM
1	Persyaratan	77,53
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	81,32
3	Waktu Penyelesaian	75,56
4	Biaya/Tarif	84,00
5	Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan	81,94
6	Kompetensi Pelaksana	73,39
7	Perilaku Pelaksana	82,96
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	82,17
9	Sarana dan Prasarana	81,06

Apabila dikomparasikan dengan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan II Tahun 2026, secara umum terjadi peningkatan pada sebagian besar unsur pelayanan. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Layanan meningkat dari **80,66** pada Triwulan I menjadi **82,60** pada Triwulan II atau mengalami kenaikan sebesar **1,94 poin**. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa berbagai upaya

perbaikan yang telah dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi SKM periode sebelumnya mulai memberikan dampak positif terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Secara rinci, komparasi nilai SKM pada setiap unsur pelayanan menunjukkan bahwa **7 (tujuh) unsur mengalami peningkatan nilai**, sedangkan **2 (dua) unsur mengalami penurunan yang relatif kecil**. Peningkatan terbesar terjadi pada unsur Waktu Penyelesaian yang meningkat sebesar **6,87 poin**, diikuti unsur **Persyaratan** sebesar **4,01 poin**, serta **Kompetensi Pelaksana** sebesar **3,21 poin**. Sementara itu, unsur **Perilaku Pelaksana** dan **Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan** masing-masing mengalami penurunan sebesar **0,08 poin**, namun keduanya masih berada pada kategori **Baik**.

Perbandingan nilai SKM Triwulan I dan Triwulan II pada masing-masing unsur pelayanan dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 2. Komparasi Hasil SKM Triwulan I dan triwulan II Tahun 2026

No.	Unsur Pelayanan	TW I	TW II	Selisih
1	Persyaratan	77,53	81,54	4,01
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	81,32	82,88	1,56
3	Waktu Penyelesaian	75,56	82,43	6,87
4	Biaya/Tarif	84	84,23	0,23
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	81,94	82,43	0,49
6	Kompetensi Pelaksana	79,39	82,6	3,21
7	Perilaku Pelaksana	82,96	82,88	-0,08
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	82,17	82,09	-0,08
9	Sarana dan Prasarana	81,06	82,26	1,2
Nilai IKM Unit Layanan		80,66	82,6	1,94

Secara keseluruhan, hasil komparasi antara SKM Triwulan I dan Triwulan II menunjukkan adanya tren peningkatan kualitas pelayanan publik di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II. Hasil ini menjadi indikator bahwa tindak lanjut yang telah dilaksanakan berjalan efektif, sekaligus menjadi dasar untuk terus melakukan penyempurnaan pelayanan secara berkelanjutan pada periode-periode berikutnya.

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II periode April–Juni 2026, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Jumlah responden yang berpartisipasi dalam pelaksanaan SKM sebanyak 75 orang, yang merupakan representasi dari pengguna layanan yang terdiri dari layanan Klinik PKP, layanan pengaduan (Benar-PKP dan SP4N Lapor!), serta layanan informasi publik (PPID). Responden berasal dari berbagai latar belakang karakteristik, baik berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, maupun kategori pengguna layanan.
- Secara umum, kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II berada pada kategori Baik, dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 82,60 dan mutu pelayanan B. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan telah memenuhi harapan masyarakat serta mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya.
- Unsur pelayanan yang masih menjadi prioritas perbaikan adalah persyaratan dan penanganan pengaduan, saran dan masukan, yang memperoleh nilai relatif lebih rendah dibandingkan unsur pelayanan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya penyederhanaan informasi persyaratan layanan, peningkatan kemudahan akses penyampaian pengaduan, serta percepatan tindak lanjut terhadap setiap masukan yang disampaikan masyarakat.
- Unsur biaya/tarif memperoleh nilai tertinggi, yang menunjukkan bahwa masyarakat menilai pelayanan yang diberikan telah transparan, tidak dipungut biaya, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, unsur lainnya seperti sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, serta sarana dan prasarana berada pada kategori baik dan perlu dipertahankan serta terus ditingkatkan secara berkelanjutan.
- Berdasarkan hasil komparasi dengan SKM Triwulan I Tahun 2026, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Layanan mengalami peningkatan dari 80,66

menjadi 82,60 atau meningkat sebesar 1,94 poin. Sebagian besar unsur pelayanan mengalami peningkatan nilai, dengan kenaikan tertinggi pada unsur waktu penyelesaian, sedangkan unsur perilaku pelaksana dan penanganan pengaduan, saran dan masukan mengalami penurunan yang relatif kecil namun masih berada pada kategori baik.

- Peningkatan nilai SKM pada sebagian besar unsur pelayanan menunjukkan bahwa tindak lanjut yang dilaksanakan atas hasil evaluasi SKM Triwulan I telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan. Hasil tersebut menjadi dasar untuk terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan pelayanan secara berkelanjutan agar mampu memberikan pelayanan yang semakin efektif, responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
- Dengan demikian, pelaksanaan SKM secara berkala tidak hanya menjadi instrumen untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat, tetapi juga menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan strategi peningkatan kualitas pelayanan publik. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pelayanan melalui inovasi, evaluasi berkelanjutan, serta pemanfaatan masukan dari masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang prima.

LAMPIRAN

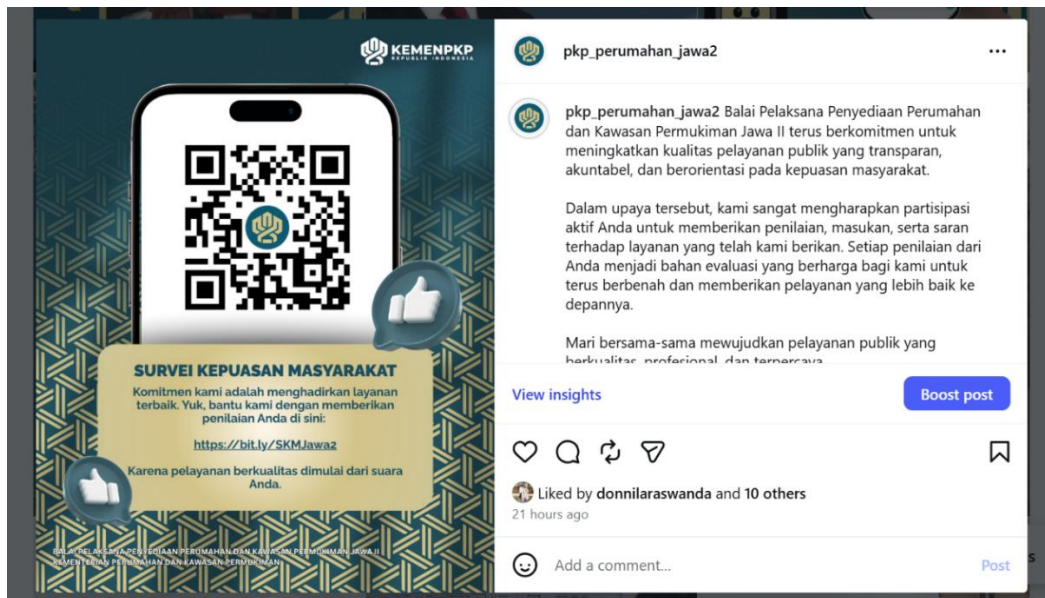
1. Kuesioner

The screenshot shows a web-based survey form for the Ministry of Housing and Urban Planning. The header includes the KEMENPKP logo and the text 'Selamat Datang di Survei Kepuasan Masyarakat Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman'. Below this, it says 'A. IDENTITAS RESPONDEN' and '* Indicates required question'. The form fields include: 'Email *' (text input), 'Jenis Kelamin *' (radio buttons for 'Laki-Laki' and 'Perempuan'), 'Pendidikan *' (dropdown menu), 'Usia *' (dropdown menu), 'Pekerjaan *' (dropdown menu), 'Alamat *' (text input), 'Domisili *' (dropdown menu), and a question 'Apakah Anda merupakan penyandang disabilitas/pendamping penyandang disabilitas?' with radio buttons for 'Ya' and 'Tidak'. A follow-up question 'Jika ya, jenis disabilitas apa yang Anda miliki/dampingi? (Jika tidak, lewati)' has radio buttons for 'Disabilitas Fisik', 'Disabilitas Intelektual', and 'Disabilitas Mental'.

Kuisiener diatas dapat diakses pada tautan dibawah berikut:

<https://bit.ly/SKMJawa2>

2. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM (Foto-Foto Pelaksanaan SKM)



Kuisiener diatas dapat diakses pada tautan dibawah berikut:

https://www.instagram.com/p/DXWS4ZmkrB9/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFiZA==

Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Layanan Klinik PKP di Universitas Katolik Parahyangan



Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Layanan Klinik PKP di Universitas Katolik Parahyangan



Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Program BSPS Melalui Klinik PKP di Kabupaten Bandung Barat

